

PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP POLITISASI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

Ilham Syahrul Jiwandono¹, Heri Setiawan², Itsna Oktaviyanti³

1)2)3) Universitas Mataram
ilham_jiwandono@unram.ac.id

Received: 8 June 2020 | Reviewed: 28 June 2020 | Accepted: 28 July 2020

ABSTRAK

Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) membawa dampak yang luar biasa, salah satunya dalam dunia politik. Terjadi berbagai tanggapan negatif di dunia maya yang menghubungkan wabah ini dengan politik yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Dilihat dari kacamata pendidikan, permasalahan ini membawa efek yang tidak baik. Hampir setiap saat, peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan dijejali dengan berita tersebut melalui media sosial. Komentar-komentar kasar menghiasi kolom komentar media sosial sehingga mengganggu psikologi peserta didik. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui pandangan mahasiswa, khususnya mahasiswa keguruan dalam menanggapi politisasi Covid-19 dilihat dari sisi mahasiswa. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mataram. Sumber data yaitu mahasiswa semester dua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mataram. Teknik pengambilan data melalui wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tahap-tahap penelitian yaitu pra lapangan, lapangan dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Etika berbagai oknum politisi yang masih rendah dengan mengesampingkan empati dan simpati kepada para korban Covid-19 dengan memanfaatkan wabah tersebut untuk kepentingan pribadi. (2) Literasi politik mahasiswa yang masih rendah sehingga mudah terpengaruh oleh propaganda yang dilakukan oknum politisi. (2) Diperlukan pendidikan politik bagi mahasiswa agar pengetahuan politik mahasiswa mumpuni sehingga tidak terpengaruh oleh berita yang belum tentu kebenarannya

Kata Kunci: Politisasi, Pendidikan Politik, Literasi Politik

ABSTRACT

The Corona Virus Disease pandemic (Covid-19) had a tremendous impact, one of which was in politics. There were various negative responses in cyberspace that connected this plague to politics that actually had nothing to do. Viewed from the point of education, this problem certainly has an adverse effect. Almost every time, students from various levels of education are stuffed with this news through social media. Rude comments adorn the social media comments column so that it disrupts the psychology of students. This study aims to determine the views of students, especially teacher students in responding to the politicization of Covid-19 from the student's perspective. The research method uses qualitative methods. Location of the study was at the University of Mataram Elementary School Teacher Education Study Program. The data source is the second semester students of the Elementary School Teacher Education Study Program, University of Mataram. Data collection techniques through unstructured interviews and documentation. Data analysis techniques using data reduction, data presentation and conclusion drawing. The stages of research are pre-field, field and data analysis. The results showed: (1) The ethics of various politicians who were still low by putting aside empathy and sympathy for the victims of Covid-19 by utilizing the outbreak for personal gain. (2) Student political literacy is still low so that it is easily influenced by propaganda by politicians. (2) Political education is required for students so that their political knowledge is qualified so that they are not influenced by news that is not necessarily true.

Keywords: *politicization, political education, political literacy*

PENDAHULUAN

Masyarakat saat ini dalam keadaan yang dapat dikatakan dirundung keresahan dalam memilih calon Presiden atau pemimpin negaranya dimasa yang akan datang. Mengingat banyak sekali motif-motif dibalik pemilihan Presiden tahun 2019 yang lalu, yang membuat masyarakat atau warga negara Indonesia menjadi sangat bingung dan kemungkinan besar akan mudah terpengaruh terhadap motif-motif politik, termasuk tagar ganti presiden dan turunkan presiden (Maulana, 2019). Berkaitan dengan Covid-19, terdapat juga tagar turunkan Menteri Kesehatan (Menkes). Selain itu, banyak tagar-tagar “aneh” menghiasi dunia maya dalam menanggapi musibah ini, diantaranya #butuhpemimpincerdas, #rememberingkhilafah #JKWturunsaja yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan solusi mengatasi Covid-19. Selain itu, banyak beredar berita *hoax* tentang berbagai musibah yang melanda negeri ini dan banyak membuat masyarakat panik. Berbagai permasalahan tersebut semakin parah karena ditunggangi oleh berbagai oknum politikus. Saat ini, etika politik yang ada dalam diri politikus

seakan sudah tidak berlaku lagi, bahkan cenderung raib. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa politik adalah tempat pertempuran kepentingan antar politikus serta partai yang menaunginya. Masyarakat juga menganggap saat ini para politikus menghalalkan segala cara untuk memenangkan pertempuran tersebut sehingga pada akhirnya merusak cara berpolitik para politikus tersebut (Diana et al., 2018).

Seperti dijelaskan diatas, masih banyak masyarakat gagal *move on* dari Pemilu 2019 yang dibuktikan dengan adanya demonstrasi menolak hasil Pilpres 2019 yang berujung kericuhan di depan kantor Bawaslu pada tanggal 21 Mei 2019 yang kemudian memanfaatkan berbagai musibah sebagai pelampiasan nafsu politik mereka. Nafsu politik seperti inilah yang membuat banyak masyarakat buta terhadap kemanusiaan yang menyebabkan hilangnya empati dan simpati kepada para korban. Dalam sejarah bangsa Indonesia, apakah ada kaitan antara ganti presiden dengan bencana? Apakah dengan mengganti presiden saat ini maka di tahun-tahun mendatang tidak akan ada bencana lagi?

Menjadi sebuah persoalan karena opini-opini tersebut digiring oleh elite politik kita yang ditelan mentah-mentah oleh masyarakat awam. Hal ini dikarenakan literasi politik masyarakat kita yang masih rendah. Terdapat dua permasalahan dalam kasus ini. Pertama, etika politik. Seharusnya para politikus menampilkan apa yang seharusnya dilihat oleh masyarakat. Kedua, literasi politik masyarakat yang rendah. Banyaknya masyarakat yang menelan mentah-mentah pendapat politisi sudah menjadi bukti bahwa literasi masyarakat kita masih kurang. Padahal, sebelum kita menerima informasi, apalagi dari sumber yang belum dikenal, kita perlu melakukan cek dan ricek terlebih dahulu.

Masalah timbul ketika kedua permasalahan tersebut muncul berbarengan saat ini. Hal ini diperparah dengan memanfaatkan Covid-19 sebagai bahan untuk menjapai tujuan politik mereka. Dilihat dari sudut pandang politik, hal ini menjadi sesuatu yang biasa karena memang dunia politik tidak jauh dari hal-hal tersebut. Jika permasalahan tersebut dibiarkan, maka budaya luhur bangsa bisa luntur, identitas bangsa bisa tergeser dan karakter bangsa akan mudah tergerus (Jiwandono, 2020b). Dari sisi pendidikan, permasalahan ini tentunya menimbulkan efek negatif bagi siswa di berbagai jenjang sekolah. Hampir setiap hari mereka dijejali informasi tentang ini. Sedangkan dari sisi psikologi, kasus ini dapat merusak mental bagi yang membacanya. Setiap saat berita *hoax* tentang Covid-19 muncul di *timeline* media sosial.

Tulisan ini akan lebih banyak melihat dari sudut pandang mahasiswa sebagai salah satu pelaku dalam dunia pendidikan.

KAJIAN TEORI

Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan satu kesatuan metode penyampaian pesan politik, yang dibagi menjadi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Sosialisasi politik merupakan bagian dari proses pendidikan politik yang didalamnya terdapat tujuan untuk membangun bagaimana seharusnya sikap masyarakat berpartisipasi melalui aktivitas politik dan sistem politik yang ada (Surbakti, 1999). Sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik adalah upaya edukatif baik disengaja ataupun tidak disengaja, yang dipergunakan untuk membentuk individu yang sadar akan politik. Sehingga masyarakat mampu menjadi pelaku politik yang partisipan dan bertanggung jawab dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Sosialisasi politik dinilai sebagai suatu cara untuk membentuk insan-insan dalam memahami serta menyadari status dan kedudukannya secara politik dalam kehidupan bermasyarakat (Dudih, 2008). Sosialisasi politik memuat hal-hal penting yang berhubungan dengan proses dan tujuan yang diinginkan dalam perjalanan politik di suatu negara, dengan demikian sosialisasi politik mempunyai hubungan yang erat dengan transmisi pemberian pengetahuan mengenai nilai-nilai, sikap politik, kepercayaan politik serta harapan politik.

Pendidikan Politik

Paham tentang pendidikan politik ternyata bukanlah sebuah konsep yang utuh dan memiliki banyak tafsir. Dalam bahasa Inggris, pendidikan politik lebih banyak diistilahkan sebagai *political socialization*. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka istilah *political socialization* sama dengan sosialisasi politik. Oleh sebab itu, dengan digunakannya istilah *political socialization*, orang banyak menyejajarkan pengertian antara pendidikan politik serta sosialisasi politik. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam artinya yang terbatas. Menurut Ramlan Surbakti, ketika belajar tentang pendidikan politik, maka orang tersebut harus diajarkan dulu mengenai sosialisasi politik, karena keduanya saling berkaitan (Surbakti, 1999).

Beliau melanjutkan, di dalam pendidikan politik, terdapat sebuah proses yang tidak bisa dipisahkan, yaitu proses antara pemberi dan penerima pesan. Dalam proses ini, warga negara bisa mengetahui, mengenal, mempelajari berbagai nilai, norma, simbol dalam politik di negara Indonesia melalui berbagai wadah, misalnya di lingkungan sekolah, pemerintahan serta dari dalam partai politik sendiri. Dapat dikatakan bahwa sikap dan pandangan politik masyarakat dapat dibentuk melalui proses sosialisasi politik.

Melalui proses sosialisasi politik inilah masyarakat memperoleh pemahaman, orientasi dan mampu bersikap dalam kehidupan berpolitik di negaranya. Sebaliknya, pendidikan politik dapat dinilai sebagai indoktrinasi politik, seperti apa yang dimaksud oleh Kartini Kartono tentang hubungan antara pendidikan dengan politik yakni bahwa pendidikan dilihat sebagai faktor politik dan kekuatan politik. Hal tersebut terjadi karena pendidikan di sekolah maupun lembaga-lembaga lainnya pada hakekatnya sebenarnya merupakan cerminan dari pihak-pihak yang sedang berkuasa dan juga merupakan perwujudan dari kehendak penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.

Dalam rangka belajar tentang pendidikan politik, terdapat berbagai cara untuk mempelajarinya, diantaranya: 1) Membaca dari surat kabar yang hampir setiap hari menampilkan berita tentang politik. 2) Berbagai siaran televisi dan radio serta tayangan film yang berkaitan dengan politik. 3) Berbagai lembaga yang ada di dalam masyarakat, seperti masjid maupun gereja serta berbagai lembaga formal dan informal yang ada di masyarakat.

Etika Berpolitik

Dari tradisi klasik dapat diperoleh beberapa hal yang menjadi prinsip bagi etika berpolitik yakni bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang berpolitik untuk memperjuangkan kebenaran dan kepentingan umum bagi kebahagiaan hidupnya serta memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas dalam hidup berpolitik selalu berdasar pada hukum moral yang sumbernya adalah nilai-nilai kemanusiaan universal. Karena itu, kegiatan politik merupakan kesadaran kodrat manusia berjuang bersama sesamanya. Dalam politik semacam ini, pemerintah tidak akan memiliki kekuasaan yang mutlak, dia hanya menjalankan kekuasaannya, menganut prinsip subsidiaritas, dan berjiwa demokratis karena berasal dari rakyat (Trinarso, 2013).

Tujuan adanya etika politik adalah agar setiap pelaku yang berkaitan dengan dunia politik, baik anggota dewan, walikota, gubernur, maupun presiden memiliki sikap yang mencerminkan seseorang yang mewakili konstituennya di pemerintahan, misal jujur, amanah, bertanggung jawab dan memiliki sikap ksatria, artinya siap mundur apabila tidak mampu menjalankan amanatnya dengan baik atau terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Perwujudan etika politik tersebut dapat dalam bentuk sikap yang menghargai antar sesama ketika berkomunikasi maupun berperilaku, tidak melakukan pembohongan kepada masyarakat, menjaga kerukunan antar golongan serta harus menjadi contoh bagi masyarakat luas. Selain itu, mereka juga harus mampu menempatkan diri, bahwa kepentingan negara lebih besar daripada kepentingan golongan maupun partai politik yang menaunginya.

Berbicara tentang politik bukan hanya bicara tentang perkara yang sifatnya sementara, namun juga menyangkut tujuan apa yang hendak dicapai dalam berpolitik tersebut. Politik menuntut agar tujuan yang hendak dicapai tersebut dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diuji oleh publik dan untuk mencapainya pun harus melewati berbagai kriteria moral (Dwihantoro, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dalam bentuk kalimat tertulis maupun lisan yang dijelaskan secara deskriptif sebagai hasil dari pengamatan di lapangan. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena-fenomena yang ada di masyarakat (Moleong, 2018). Teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman bahwa ada tiga alur teknik analisis data, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini berlokasi di Jurusan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Mataram. Sumber data dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yakni mahasiswa semester dua kelas 2H yang menempuh mata kuliah Pendidikan PKn dan berjumlah 37 mahasiswa. Sumber

data sekunder berupa hasil dokumentasi di berbagai media massa. Tahap-tahap penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu pra lapangan, lapangan dan tahap analisis data (Moleong, 2018).

Pada tahap pra lapangan, kegiatan yang dilakukan adalah menyusun rancangan penelitian serta mempersiapkan berbagai instrumen penelitian, menentukan lokasi penelitian, memilih dan n informan serta menyiapkan perlengkapan penelitian. Pada tahap lapangan, yang dilakukan adalah mengenal lokasi penelitian dan persiapan diri, memasuki lokasi serta mengumpulkan data. Pada tahap analisis data, yang dilakukan adalah menganalisis dan menginterpretasi data.

PEMBAHASAN

Persoalan Etika Politik di Indonesia

Saat ini, jika kita membicarakan politik di Indonesia, banyak yang langsung menanggapi sinis. Hal ini cukup wajar mengingat dunia perpolitikan Indonesia belum sepenuhnya matang. Pernyataan tersebut juga diperparah oleh ulah berbagai politisi yang menyalahgunakan wewenangnya. Mereka memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi. Hal ini sudah menjadi rahasia umum. Yang terbaru, banyak politisi yang menggunakan bencana Covid-19 sebagai ajang untuk menunjukkan eksistensinya. Tidak sedikit politisi yang hilang simpati dan empatinya terhadap para tenaga medis, bahkan korban. Seolah-olah, politisi saat ini memiliki etika yang tidak layak untuk ditiru.

Etika politik merupakan kristalisasi dari nalar (logika) politik warga bangsa itu sendiri. Kasus diatas merupakan pelanggaran terhadap etika politik. Apa yang mereka lakukan merupakan tanda matinya hati nurani serta dapat menancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia (Ihsan, 2009). Kasus diatas sering terjadi dalam kehidupan kemasyarakatan, termasuk dalam kegiatan politik dalam suatu negara, termasuk di Indonesia.

Antara etika dan perilaku harusnya dapat berjalan beriringan, namun saat ini sudah mulai diabaikan. Hal tersebut ditambah dengan ulah sebagian aparat pemerintahan yang kadang bertindak semaunya sendiri serta melupakan tugas dan fungsinya yang seharusnya

memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Kehidupan politik yang bersih tidak akan ditemui jika masih terdapat hal-hal seperti tersebut diatas. Saat ini berita tentang tidak pidana korupsi, nepotisme, politika uang menghiasi wajah perpolitikan di Indonesia (Kartika & Si, 2015).

Saat ini banyak masyarakat yang berpandangan bahwa ketika berbicara tentang politik, maka seperti halnya berteriak di padang pasir, tidak ada yang menganggap. Hal ini dikarenakan saat ini, kehidupan politik bukan dibangun dari yang semestinya serta tidak patuh kepada yang seharusnya. Banyak politisi yang menghalalkan segala cara agar mereka dapat mengeruk keuntungan. Dan ini benar-benar diterapkan di Indonesia. Hasil wawancara dengan RH, salah satu mahasiswa diperoleh informasi bahwa menghalalkan segala cara dalam berpolitik merusak citra mereka di depan umum, khususnya mahasiswa. Narasumber melanjutkan bahwa banyak orang merasa muak dengan tingkah laku politisi kita, termasuk dirinya. Sebagai bukti, sudah berapa puluh politisi yang terjerat kasus korupsi? Diantaranya adalah AU, SN dan AS. Seharusnya, para elite politik menampilkan perilaku yang mencerminkan seorang wakil rakyat, seorang yang jujur, rendah hati dan mengayomi. Tujuan dari etika politik adalah menumbuhkan sikap jujur, amanah dan siap menanggung resiko jika melanggar peraturan (Dwihantoro, 2013). Hasil dokumentasi juga menunjukkan demikian. Banyak masyarakat yang terpengaruh oleh isu-isu yang digoreng oleh politisi. Hal tersebut tentu tidak sehat bagi dunia pendidikan. Berikut hasil dokumentasi penulis:



Gambar 1: Politisasi Covid-19. (sumber: Twitter)

Gambar diatas menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat kita yang memanfaatkan bencana sebagai bahan menyalurkan nafsu politik. Kasus tersebut diperparah dengan adanya media yang mengutip pernyataan politisi dan para pengamat yang tidak henti-hentinya mengkritik pemerintah tanpa memberikan solusi berarti dalam mengatasi penyebaran dan penanggulangan bencana Covid 19 di seluruh Indonesia. Permasalahan tersebut semakin membuat rumit proses pemutusan rantai Covid-19.

Kejadian tersebut seharusnya dimanfaatkan oleh media untuk menjadi alat pemersatu bangsa yang terpecah pasca kontestasi Pemilu 2019. Diperlukan keaktifan pers Indonesia dalam membantu pemerintah mengatasi pandemi ini. Keaktifan yang dimaksud adalah ikut serta dalam membangun budaya politik yang sehat. Pers jangan hanya mengejar rating saja dan melupakan sisi kemanusiaan. Hasil wawancara dengan SS, salah satu narasumber diperoleh informasi bahwa seharusnya media menonjolkan sisi kemanusiaan, bukan malah menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Seharusnya media juga fokus meliput serta memberikan solusi dalam mengatasi pandemi ini.

Etika politik para politisi hendaknya diatur karena gerak-gerik mereka diamati oleh masyarakat berbagai kelompok umur. Disisi lain, Rocoerur (Recoeur, 2013) menjelaskan bahwa etika politik memiliki tujuan untuk mengarahkan masyarakat untuk hidup bersama dengan baik agar tercipta kehidupan yang adil.

Jika kejadian ini terus menerus terjadi, tidak menutup kemungkinan tujuan etika politik diatas tidak dapat tercapai. Politikus yang diharapkan saat ini adalah yang jujur dan mampu menjaga keberagaman Indonesia agar tidak terpecah belah (Trinarso, 2013). Pernyataan tersebut diamini oleh salah satu narasumber yang mengatakan bahwa politikus yang ideal adalah politikus yang mengerti keadaan konstituennya, indikatornya adalah jujur, menghargai dan memiliki perhatian kepada masyarakat yang memilihnya.

Pentingnya Pendidikan Politik dan Literasi Politik Bagi Mahasiswa

Banyak masyarakat mengkonotasikan negatif pada istilah politik dan politisasi. Padahal, Indonesia adalah negara besar dengan berbagai keunikannya, termasuk di bidang pemerintahan. Indonesia boleh dikatakan sebagai kiblat negara demokrasi di kawasan Asia (Jiwandono, 2020a). Banyak yang mengartikan bahwa politisasi adalah cara berpolitik yang tidak etis dan pragmatis yang dilakukan individu maupun kelompok. Politisasi adalah kegiatan politik yang dijalankan oleh politisi dalam suatu kelembagaan politik. Apa yang dirasakan oleh masyarakat memang ada dasarnya. Hal ini wajar mengingat kekonyolan yang terjadi kala beberapa orang yang memiliki kepentingan mempolitisasi wabah Covid-19. Salah satu contohnya ketika salah satu bupati di Jawa Tengah memberikan bantuan sembako dan *hand sanitizer* dimana ada foto yang terpampang di barang tersebut. Kejadian tersebut tentu memuat unsur politis.

Sebagai *agent of change*, mahasiswa harus dibekali literasi politik yang kuat sehingga menjadi pioneer dalam mengubah cara pandang masyarakat terhadap dunia politik. Literasi politik merupakan aspek penting dalam upaya belajar tentang demokrasi. Banyak masyarakat yang acuh terhadap politik dikarenakan mereka kurang peka terhadap isu politik yang sedang berkembang (Bashori, 2018). Berkaitan dengan meningkatnya suhu politik yang terjadi setiap saat, maka kebutuhan terhadap literasi politik menjadi meningkat, yang bisa menggerakkan

kaum milenial melakukan perilaku informasi untuk mengetahui sosok atau figur dari masing-masing pemimpin yang akan memimpin Indonesia ke depan yang lebih baik dan lebih sejahtera (Bakhtiyar, 2018).

Konsumsi publik dengan minimnya pemahaman tentang politik membuat banyak pihak seolah menganggap fenomena ini ialah hal yang biasa. Kontribusi masyarakat saat ini sangat dibutuhkan dalam mengatasi musibah ini. Saat ini bukan saatnya lagi bermain-main memanfaatkan bencana ini. Pemahaman masyarakat terhadap isu politik harus segera dibangun agar mereka lebih peka terhadap lingkungan yang ada di komunitasnya.

Hasil wawancara dengan RA, RG, RM dan RAR, narasumber di lokasi penelitian diperoleh informasi bahwa literasi politik mereka masih rendah. Indikasinya adalah mereka masih terpengaruh oleh perkataan politisi dan media sosial. Narasumber memberi contoh banyak mahasiswa dan masyarakat yang membuat status atau berkomentar di media sosial yang tidak ada hubungannya dengan wabah Covid-19 seperti terekam di gambar 2 dibawah. Ketika ada politisi berkomentar ganti presiden, seperti terpublikasi di acara Indonesia Lawyer Club (ILC), mereka juga ikut-ikutan membuat status tersebut di media sosial. Padahal, pernyataan tersebut hanya didasarkan pada satu permasalahan saja tanpa melihat pencapaian yang lain. Penggiringan opini seperti inilah yang patut disayangkan. Mereka mengaitkan wabah Covid-19 ini dengan isu-isu politik yang tidak jelas ujungnya. Berdasar kasus tersebut, sudah seyogyanya mahasiswa dibekali literasi politik yang kuat. Pengetahuan dan keterampilan dalam politik hanya bisa didapatkan melalui literasi politik (Faisal, 2017). Hasil wawancara dengan beberapa narasumber diatas juga diperkuat oleh hasil dokumentasi yang dilakukan penulis, berikut gambarnya:



Gambar 2: Postingan yang dibuat oleh masyarakat (sumber : Facebook)

Gambar diatas menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang mencoba memanfaatkan Covid-19 sebagai bahan melakukan propaganda akibat dari komentar-komentar politisi seperti yang disebutkan di penjelasan diatas. Jika masyarakat mampu memahami literasi politik dengan baik, maka kejadian tersebut tidak akan terjadi. Hal ini berbahaya bagi masyarakat awam yang masih belum memiliki pengetahuan tentang politik. Terdapat kaitan antara literasi politik dengan proses berpikir kritis masyarakat. Apabila masyarakat mampu berpikir kritis, maka mereka dapat memahami kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara dan mampu berpartisipasi aktif daalm kehidupan politik (Faisal, 2017). Contohnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan *new normal*, apabila masyarakat paham terhadap kebijakan tersebut, maka dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari mereka akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kebijakan *new normal* bukan berarti melonggarkan protokol kesehatan.

Sutisna (Sutisna, 2017) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa jalan untuk meningkatkan literasi politik masyarakat, secara umum dilakukan melalui pendidikan politik atau pendidikan kewarganegeraan. Pendidikan politik tersebut dapat diperoleh dari media massa, media elektronik, media sosial hingga bangku persekolahan. Sebagai contoh, hampir setiap hari di televisi menyajikan berbagai kebijakan mengenai Covid-19. Kebijakan-kebijakan tersebut tentu sangat berkaitan dengan dunia politik. Oleh sebab itu, masyarakat perlu dibekali literasi

yang kuat melalui pendidikan politik. Pengetahuan politik sangat membantu warga ketika berpartisipasi politik, paling tidak dapat menjadi panduannya sehingga tidak seperti orang buta. Hasil dokumentasi di media sosial menunjukkan bahwa banyak mahasiswa ikut mempolitisasi Covid-19. Hal ini dikarenakan pengetahuan politik yang kurang memadai sehingga dia berpotensi untuk mudah dimanipulasi atau dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik (Sahid Gatara & Nurjaman, 2017).

KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 membawa perubahan dalam berbagai bidang, salah satunya di dunia politik. Sebagai agen perubahan, mahasiswa memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengatasi persoalan tersebut. Banyak mahasiswa yang berpandangan bahwa Covid-19 ditunggangi oleh kepentingan politis. Misal, memberikan paket sembako dengan gambar seorang Bupati. Hal ini terjadi di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Pendidikan politik sangat dibutuhkan saat ini melihat berbagai permasalahan seperti diatas. Politisi seharusnya memanfaatkan situasi ini untuk mendekatkan diri kepada konstituennya, bukan malah mencari keuntungan dari segi politis. Selain itu, peran media juga sentral dalam melihat situasi ini. Saat ini banyak media yang ikut serta dalam memperparah kondisi yang sudah kacau. Media harus mengesampingkan rating dan lebih mengutamakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakhtiyar. (2018). Dinamika Literasi Politik Menjelang Tahun 2019: Urgensitas Memahami Perilaku Pemilih Milenial. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 2(2), 65–72.
- Bashori, K. (2018). Pendidikan Politik di Era Disrupsi. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 2(2), 287–310. <https://doi.org/10.32533/02207.2018>
- Diana, R., Masruri, S., & Surwandono, S. (2018). Etika Politik dalam Perspektif al-Mawardi. *Tsaqafah*, 14(2), 363. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v14i2.2433>
- Dudih, S. (2008). *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan dan Mahasiswa*. Jakarta: Guepedia Publisher.

- Dwihantoro, P. (2013). *Etika Dan Kejujuran Dalam Berpolitik*. 4(2), 13–21.
- Faisal, B. A. (2017). *Literasi Politik Dan Kampanye Pemilu*. FIKOM UP Press.
- Ihsan, A. B. (2009). *Etika Dan Logika Berpolitik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jiwandono, I. S. (2020a). Dinamika Sosial Sikap Narcisctic Aksi Demonstrasi Mahasiswa Dalam Prospek Demokrasi Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, VIII(1), 34–40.
- Jiwandono, I. S. (2020b). Pemanfaatan Dan Penggalian Nilai-Nilai Filosofis Wayang Dalam Upaya Menumbuhkan Karakter Mahasiswa Prodi PGSD. *Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan*, 20(1), 74–81.
- Kartika, D. I. M., & Si, M. (2015). *Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Etika Politik Di Indonesia*.
- Maulana, M. A. K. (2019). *Tagar 2019 Ganti Presiden Menurut Teori Simulacra Jean Baudrillard*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-37*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Recoeur, P. (2013). *The Moral, The Ethical, And The Political*. United Kingdom
- Sahid Gatara, A. A., & Nurjaman, K. (2017). Literasi Politik Masyarakat Pesisir Dan Manajemen Partai Politik. *JISPO*, 7(2), 137–157.
- Surbakti, R. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sutisna, A. (2017). *Peningkatan Literasi Politik Pemilih Pemula Melalui Pendekatan Pembelajaran Kontekstual*.
- Trinarso, A. P. (2013). Pendidikan Dan Etika Berpolitik. *Arete*, 2(2).
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>